

Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia

2015-2019

Indeks
Hijau

Obligasi
Hijau

Produk
Ramah
Lingkungan

Transportasi
Hijau

Energi
Terbarukan

Konservasi
Energi

Pariwisata
Ramah
Lingkungan

Pertanian
Organik

2015-2019

***Roadmap Keuangan Berkelanjutan
di Indonesia***

Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia

Daftar Isi

Table of Contents

DAFTAR SINGKATAN / Abbreviations.....	1
SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK / Foreword from Chairman of OJK.....	3
SAMBUTAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN / Foreword from Minister of Environmental Affairs and Forestry	7
BAB 1. KERANGKA PIKIR ROADMAP / Chapter 1. Framework of the Roadmap.....	9
A. Latar Belakang / Background.....	9
B. Tujuan Penyusunan <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan / Objective of the Development of the Roadmap for Sustainable Finance.....	15
BAB 2. TUJUAN DAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA / Chapter 2. Goal and Principle of Sustainable Finance in Indonesia	16
A. Definisi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia / Definition of Sustainable Finance in Indonesia	16
B. Tujuan dan Prinsip Keuangan Berkelanjutan / Goal and Principle of Sustainable Finance.....	16
BAB 3. RENCANA DAN IMPLEMENTASI PENGUATAN KEUANGAN BERKELANJUTAN / Chapter 3. Plan and Implementation to Strengthen Sustainable Finance	19
A. Peningkatan <i>Supply</i> Pendanaan Keuangan Berkelanjutan / Increase Supply of Sustainable Financing	22
B. Peningkatan <i>Demand</i> Bagi Produk Keuangan Berkelanjutan / Increase in Demand Sustainable Finance Products	23
C. Pengawasan Implementasi Keuangan Berkelanjutan serta Koordinasi dengan Instansi Terkait / Oversight of Sustainable Finance Implementation and Coordination with the Relevant Ministries/Agencies	24
TABEL RENCANA KERJA KEUANGAN BERKELANJUTAN / Implementation Plan	27
TIM PENYUSUN <i>ROADMAP</i> KEUANGAN BERKELANJUTAN / Drafting Team.....	31

Daftar Grafik dan Tabel

List of Graphics and Tables

Grafik/Graphic 1. Kerangka Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Framework	10
Grafik/Graphic 2. Biaya Indikatif terkait Kontribusi Sektor bagi Penurunan Emisi GRK/ Indicative Costs related to Sectors Contribution towards the Targeted GHG emissions reduction	12
Grafik/Graphic 3. Roadmap Keuangan Berkelanjutan/Roadmap for Sustainable Finance.....	20
Grafik/Graphic 4. Rencana Kerja Strategis Keuangan Berkelanjutan/Strategic Activities to Implement Sustainable Finance.....	21

Tabel/Table 1. Kontribusi sektor bagi target penurunan emisi GRK/Sector contribution towards the targeted GHG emission reduction	11
---	-----------

Daftar Singkatan Abbreviations

BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional National Development Planning Agency
BAU	Business as Usual
BEI/IDX	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
BI	Bank Indonesia
GRK/GHG	Gas Rumah Kaca Greenhouse Gases
IKNB	Industri Keuangan Non Bank Non-Bank Financial Industry
IJK	Industri Jasa Keuangan Financial Services Industry
LJK/FSI	Lembaga Jasa keuangan Financial Services Institutions
MPSJKI	Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Master Plan for Indonesia Financial Services Sector
mTCO₂e	Metric Ton Carbondioxide equivalent
OJK	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
RAN GRK	Rencana Aksi Nasional dalam rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca National Action Plan within the framework of Greenhouse Gas Emission Reduction
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Medium Term Development Plan
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Long Term Development Plan
UU PT	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
UUPPLH	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Law No. 32 of 2009 concerning Conservation and Management of the Environment

Sambutan Ketua Dewan Komisiner OJK

Foreword from the Chairman of the Board of Commissioner of OJK

Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma baru dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, telah menarik perhatian dan komitmen banyak lembaga dan negara. Begitu pentingnya *issue* ini sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bekerjasama dengan berbagai pemerintah, *civil society* dan pelaku ekonomi lainnya telah menyusun kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu mempertemukan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan/kelestarian alam, menyediakan proses transformasi ekonomi, serta memperluas akses masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, dan penegakan keadilan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa permasalahan sosial dan lingkungan hidup yang selama ini belum dimasukkan dalam perhitungan ekonomi menjadi unsur penting yang perlu untuk diperhatikan. Keseimbangan antara kepentingan untuk memperoleh profit tidak berarti dapat memberikan legitimasi untuk menurunkan perhatian dan komitmen menjaga lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Inisiatif global dari beberapa lembaga keuangan di dunia telah dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa inisiatif global dimaksud diantaranya seperti Kesepakatan RIO+ yang memuat komitmen negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global dan membantu negara-negara berkembang juga melakukan program pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, *The Equator Principles* (EP) yang diikuti 70 institusi keuangan yang berkomitmen untuk tidak akan memberikan pinjaman atas proyek bernilai USD 10 juta atau lebih jika calon debiturnya tidak mematuhi aturan-aturan sosial dan lingkungan hidup yang berlaku dan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh EP. *United Nations Environment Programme – Finance Initiative* (UNEP-FI) yang didirikan sejak tahun 1972 sampai dengan 2013 telah memiliki anggota lebih dari 200 lembaga keuangan termasuk 2 (dua) bank dari Indonesia yaitu BNI dan Bank Jabar Banten. Inisiatif dari internasional lainnya adalah *Global*

Sustainable development as a new paradigm in generating economic growth has gained the attention and commitment of many institutions and countries. This issue is so important, that the United Nations in cooperation with various governments, civil society and other economic players have developed a sustainable development framework that is expected to bring economic and environmental sustainability interests together, provide economic transformation process, and expand access for the poor to get out of poverty, and enforce justice. This also takes into account that the social and environmental issues which have not been included in the economic calculations have become important elements that need to be considered. The balance between the importance to make profits does not legitimize a lower attention and commitment to protecting the environment and a better social life.

A number of global initiatives from several financial institutions worldwide were established to support sustainable development, such as the RIO+ Agreement which includes the commitment of developed countries to reduce greenhouse gas emissions globally and to help developing countries to also undertake economic development programs that are environmentally friendly, *The Equator Principles* (EP) which are observed by 70 financial institutions committed to not provide loans to projects worth USD 10 million or more if the prospective debtor does not comply with the prevailing social and environmental regulations and follow procedures established by the EP. *The United Nations Environment Programme - Finance Initiative* (UNEP-FI) which was established since 1972 to 2013 has members of more than 200 financial institutions, including two (2) Indonesian banks, BNI and Bank Jabar Banten. *The Global Reporting Initiative* (GRI) is another international initiative. The GRI guidelines were adopted from the UN Environment Programme (funded by the UN Development Fund), and serves

Reporting Initiative (GRI). Pedoman GRI diadopsi dari the UN *Environment Programme* (penyandang dana dari UN *Development Fund*), merupakan salah satu pedoman dalam menyusun laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat secara akuntabel.

Indonesia sebagai salah satu negara G20, juga telah menunjukkan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di tahun 2020 pada Pittsburgh Summit di tahun 2009. Komitmen Indonesia untuk menurunkan 26% emisi gas rumah kaca dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional telah diterjemahkan kedalam Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca (RAN GRK). Pada rencana tersebut disampaikan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% akan diperoleh dari kehutanan dan lahan gambut sebesar 50%, energi dan transportasi sebesar 3,8%, pertanian sebesar 18%, industri 1,8% dan limbah sebesar 5,9%. Disamping itu, pemerintah juga telah memasukkan *framework* pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang yang menyebutkan empat aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan.

Sebagai salah satu otoritas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya memiliki peran untuk mensukseskan komitmen tersebut melalui program keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*). Program ini dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak sehingga tercipta dukungan pembiayaan kepada lembaga yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Program keuangan berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan. Arah pengembangan untuk peningkatan daya tahan dan daya saing didasari atas pemikiran bahwasanya *sustainable finance* merupakan sebuah tantangan dan peluang baru dimana Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memanfaatkan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih stabil. Selanjutnya untuk mencapai

as one of the guidelines in developing sustainability reports. A sustainability report is a report made by a company in order to disclose or communicate to all stakeholders on its economic, environmental and social performance accountably.

Indonesia as one of the G20 countries, has also demonstrated its commitment to reduce greenhouse gas emissions by 2020 at the Pittsburgh Summit in 2009. Indonesia's commitment to reduce greenhouse gas emission (GHG) by 26% at its own expense or up to a 41% reduction with international support has been translated into a National Action Plan for the Reduction of Greenhouse Gas Emission (RAN GRK). The plan states that the 26% reduction of greenhouse gas emissions will come from forestry and peatland 50%, energy and transportation 3.8%, agriculture 18%, industry 1.8% and waste 5.9%. Furthermore, the government has also incorporated the sustainable development framework in the Medium and Long Term Development Plan that comprises four aspects of sustainable development, namely the social, economic, environmental and institutional aspects.

As an integral part of the Republic of Indonesia, OJK certainly plays a role in achieving this commitment through its sustainable finance program. The program is carried out through the cooperation of various parties to create financial support to industries that practice sustainable finance principles. The sustainable finance program not only seeks to increase financing but also to increase the durability and competitiveness of financial services institutions. The development orientation to increase durability and competitiveness is based on the premise that sustainable finance is a challenge and a new opportunity that FSI can benefit from to grow and develop more stably. Furthermore, to achieve this through systematic stages, OJK in cooperation with relevant institutions have developed a Sustainable Finance Roadmap. This roadmap sets forth the end goal of sustainable finance in Indonesia to be achieved in the medium

hal tersebut melalui tahapan-tahapan yang sistematis, OJK bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait telah menyusun *Roadmap Keuangan Berkelanjutan*. *Roadmap* ini bertujuan untuk menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK serta untuk menentukan dan menyusun tonggak perbaikan terkait keuangan berkelanjutan. *Roadmap* ini akan menjadi acuan bagi OJK dan pelaku industri jasa keuangan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terutama pemerintah, pelaku industri maupun lembaga internasional.

Seiring dengan tingginya kebutuhan energi untuk mendukung pembangunan, kegiatan *sustainable finance* di awal tahun akan memprioritaskan pada upaya pengembangan energi baru terbarukan maupun konservasi energi. Posisi Indonesia yang saat ini tengah membutuhkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi untuk pemanfaatan demografi bonus dan untuk keluar dari *middle income trap*, membutuhkan pasokan energi yang cukup tinggi. Dukungan kepada sektor energi akan dibarengi dengan dukungan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas yaitu sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* tinggi seperti pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, infrastruktur, UMKM serta energi.

Dalam jangka panjang, penyaluran kepada industri sektor strategis dengan konsep pembiayaan berkelanjutan diharapkan akan mendorong tumbuhnya ekonomi secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan memberikan pasar yang lebih besar bagi industri jasa keuangan. Pasar yang lebih besar akan tercipta seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan yang kemudian akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan Sektor Jasa Keuangan pada khususnya dan diharapkan juga dapat mengurangi defisit neraca pembayaran Indonesia.

OJK selaku otoritas pengawas LJK, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada *International Finance Corporation (IFC)-World Bank* dan *Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)* yang telah bekerjasama memberikan masukan kajian

term (2015-2019) and long term (2015-2024) by the financial services industry under the supervision of OJK and determines and prepares the benchmark for improvements in sustainable finance. This roadmap will serve as a reference for OJK and the financial services industry as well as other parties who have an interest in supporting sustainable development, especially the government, industries and international institutions

Due to the high energy requirements to support development, sustainable finance activities at the beginning of the year will give priority to the development of new renewable energy and energy conservation. Indonesia, which currently needs a fairly high economic growth to take advantage of the demographic bonus and to get out of the middle income trap, requires a fairly high energy supply. Support to the energy sector will be accompanied by support for the development of the priority economic sectors, namely sectors that have a high multiplier effect such as agriculture in the broadest sense, manufacturing, infrastructure, SMEs and energy.

In the long term, the distribution of sustainable financing to strategic sector industries is expected to encourage sustainable economic growth, which in turn will provide a larger market for financial services institutions. The creation of a larger market along with its generated economic growth will have a positive impact on the sustainability of Financial Services Institutions in particular, and is also expected to reduce Indonesia's balance of payments deficit.

OJK as the supervisory authority of Financial Services Industry, would like to thank the International Finance Corporation (IFC)-World Bank and Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) who has collaborated in providing feedback

beberapa alternatif pengembangan *sustainable finance* untuk Buku *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan ini. Selanjutnya tidak lupa OJK berterima kasih kepada beberapa pihak yang memberikan masukan *roadmap* antara lain: Asosiasi Industri Jasa Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *German Federal Ministry for Economic Cooperation* (RED-GIZ), dan *United States Agency for International Development* (USAID). OJK menyambut baik keterlibatan lembaga nasional maupun internasional untuk mendukung inisiatif keuangan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga segala upaya kita dalam membangun bangsa ini dengan keuangan berkelanjutan memperoleh petunjuk serta kemudahan dari Allah SWT. Sekian dan terima kasih.

on several sustainable finance development alternatives for this Sustainable Finance Roadmap Book. Furthermore, OJK would also like to thank several parties that have provided feedback for the roadmap, among others: the Financial Services Industry Association, the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of National Development Planning Agency, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Ministry of Industry, the Ministry of Energy and Mineral Resources, German Federal Ministry for Economic Cooperation (RED-GIZ), and the United States Agency for International Development (USAID). OJK welcomes the involvement of national and international institutions to support sustainable finance initiatives.

Finally, we hope the Allah Almighty will guide and facilitate our efforts in building this nation through sustainable finance. Thank you.

Jakarta, 5 Desember/December 5, 2014
Ketua Dewan Komisioner OJK
Chairman of the Board of Commissioner of OJK



Muliaman D Hadad



Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Foreword from the Minister of Environmental Affairs and Forestry

Sesuai dengan amanat dari UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka salah satu instrumen dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup disamping instrumen “*command and control*” (atur dan awasi) dan instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui instrumen ini diharapkan adanya dorongan dan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mengimplementasikan amanat tersebut.

Melalui berbagai kebijakan serta program-program Kementerian LH dan Kehutanan yang telah dikembangkan maka diharapkan akan terjadi perubahan paradigma dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup kita. Upaya melindungi dan mengelola bukanlah untuk tujuan perlindungan fungsi lingkungan semata tetapi juga mampu memberikan peluang bagi penciptaan usaha kegiatan ekonomi baru, perluasan dan peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan teknologi dan budaya ramah lingkungan.

Dalam hal penciptaan usaha kegiatan ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan maka kegiatan ini haruslah diimbangi dengan pembentukan aturan dan kebijakan pembiayaan keuangan yang mempersyaratkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan *non-bank*.

Dengan dicanangkannya “*Roadmap* Keuangan Berkelanjutan” ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat mendukung dan mengapresiasi momen ini, karena dengan “*Roadmap*” ini nantinya menampilkan arahan yang jelas bagi upaya internalisasi lingkungan hidup dan pengarus utamaan lingkungan hidup pada lembaga jasa keuangan bank dan *non bank*.

As mandated by Law No. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, among the instruments that can be utilized to mitigate environmental pollution and damage other than the command and control and community empowerment instruments is the green economic instrument. It is expected that this instrument will be able to help motivate and generate support from various concerned parties with regards to the implementation of the aforementioned mandate.

The Ministry of Environmental Affairs and Forestry aims to achieve a paradigm shift in the initiative to protect and manage our environment through the development of various policies and programs. The effort to protect and manage the environment is not solely aimed to conserve the function of the environment, but also to open up opportunities for the creation of new economic activities, development and enhancement of the quality of manpower, as well as the development of environmentally friendly technology and culture.

The initiative to contribute towards the creation of new environmentally friendly economic activities must be carried out simultaneously with the initiative to develop financing regulations and policies that requires banks and non-bank financial institutions to uphold the environmental protection and management principles.

The Ministry of Environmental Affairs and Forestry fully endorses and appreciates the publication of this “*Roadmap for Sustainable Finance*”, which we believe provides clear guidance that will be the key in the endeavor to internalize and mainstream the environmental protection principles among banks and non-bank financial institutions.

Saya sangat berharap bahwa instrumen pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan serta instrumen asuransi lingkungan hidup dapat terus dioptimalisasikan terutama untuk pengembangan dan penerapannya pada kegiatan ekonomi baru dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Sekali lagi Saya menyambut baik dengan adanya kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Otoritas Jasa Keuangan yang telah terbangun ini, sehingga dapat terjadi sinergi yang kuat dalam upaya bersama menciptakan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi Nawacita dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Saya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat bergembira dengan adanya *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 ini, semoga apa yang telah dibuat dapat menjadi pedoman dan acuan yang kuat bagi sektor jasa keuangan untuk mendukung tercapainya sistem keuangan yang berkelanjutan dan akhirnya dapat mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

It is my hope that continuous effort will be made to develop new instruments to help foster the financial institution and capital market system as well as environmental insurance products, with particular focus on its development and implementation to support the new economic activities that will contribute to our initiative to achieve sustainable development.

Once again, I applaud this ongoing cooperation between the Ministry of Environmental Affairs and Forestry and Financial Service Authority (OJK), which already demonstrated good synergy in our joint effort towards of achieving sustainable development as our common goal in line with Nawacita or the priority agenda under the current leadership of President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla. I, the Minister of Environmental Affairs and Forestry, fully support the development of this 2015-2019 Roadmap for Sustainable Finance. I hope that the Roadmap will be able to serve as the main directive and reference for development in the sustainable finance sector and contribute towards achieving sustainable development in Indonesia.

Jakarta, 5 Desember/December 5, 2014
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
the Minister of Environmental Affairs and Forestry



Siti Nurbaya

Bab 1 Kerangka Pikir *Roadmap*

Chapter 1. Framework of the Roadmap

A. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, pembangunan yang semata-mata menargetkan pertumbuhan ekonomi telah mendapat banyak sorotan, terutama dengan makin maraknya isu penurunan kualitas lingkungan hidup, isu kesenjangan sosial yang makin melebar dan isu perubahan iklim dengan segala implikasinya. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi mendorong dicetuskannya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, mencantumkan delapan misi pembangunan nasional dengan misi keenam adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Misi keenam ini mencakup antara lain:

- Pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan; dan
- Pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 mencantumkan aspek lingkungan hidup sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan dan merekomendasikan lebih lanjut untuk mengembangkan aspek lingkungan hidup sebagai salah satu pilar utama setara dengan aspek ekonomi dan sosial.

Dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan ekonomi, disebutkan juga pembangunan ketahanan pangan dan pembangunan ketahanan energi sebagai prioritas pembangunan ekonomi.

A. Background

In the last two decades, development initiatives solely aimed to generate economic growth has been placed under scrutiny, particularly amidst the rampant discussion on the quality decline of the environment, growing social divide and climate change along with its implications thereof. Considerations of the negative impacts brought about by the economic development process prompted the move to adopt the sustainable finance model that gives precedence to economic, environmental and social aspects.

The Long Term Development Plan (RPJP) for the period of 2005-2025 stated eight national development missions. The sixth mission, "Realizing a greener and sustainable Indonesia", among others comprises of:

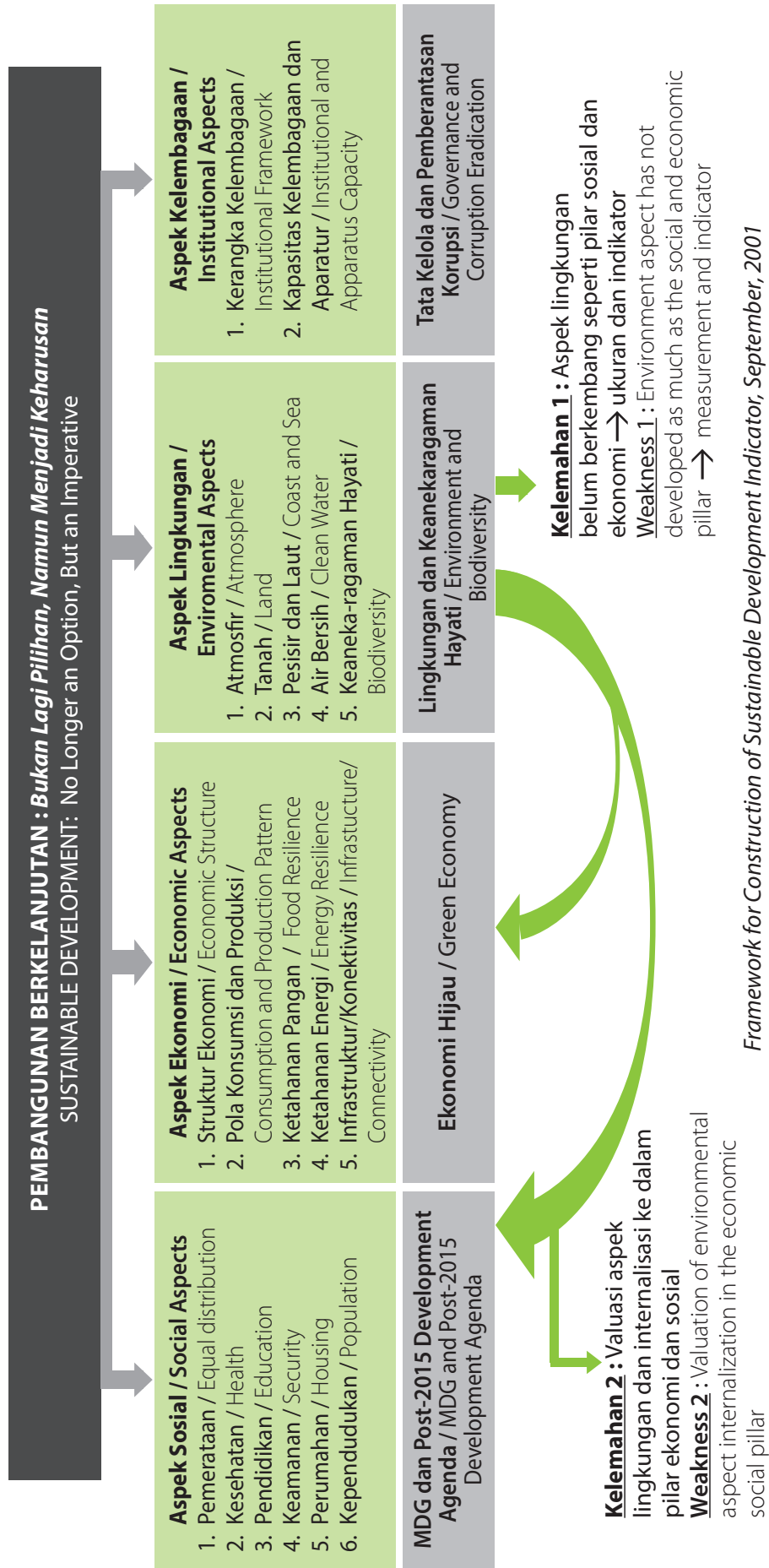
- Management of development implementation that maintains balance between the utilization, sustainability, existence and benefits of the natural resources and environment;
- Economic utilization of the natural resources and environment in a sustainable manner; and
- Maintenance and utilization of bio diversity as the basic capital requirement for development.

The RPJM draft for the period of 2015-2019 includes environmental aspects as one of the sustainable development pillars and recommends taking in the environmental aspects as one of the main pillars together with economic and social aspects.

The main objectives of economic development policy also mentioned food resilience and energy resilience as its priorities.

Grafik 1. Kerangka Pembangunan Berkelanjutan¹

Graphic 1. Sustainable Development Framework¹



Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk penanggulangan perubahan iklim antara lain melalui target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan pembiayaan sendiri atau hingga 41% dengan dukungan dana internasional pada tahun 2020. Target penurunan GRK tersebut akan diupayakan melalui berbagai kegiatan mitigasi dan adaptasi di lima sektor prioritas seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

In 2009, the Government of Indonesia has declared its commitment to tackle the challenge of climate change among others by setting a target of reducing greenhouse gas (GHG) emission by 26% at its own expense or up to a 41% reduction with international funding support by 2020. The GHG reduction target is envisioned to be attained by taking various mitigation and adaptation measures in five priority sectors as set forth in the following table:

Tabel 1. Kontribusi sektor bagi target penurunan emisi GRK²
Table 1. Sector contribution towards the targeted GHG emission reduction²

Sektor / Sector	Emisi dalam mTCO ₂ e tahun 2020 / Emission in mTCO ₂ e for 2020		Penurunan emisi GRK terhadap BAU (%) / GHG emission reduction from BAU (%)
	BAU	Penurunan Emisi GRK / GRK emission reduction	
Kehutanan dan lahan gambut / Forestry and peat land	1344	672	50%
Energi dan transportasi / Energy and transportation	1000	38	3.8%
Pertanian / Agriculture	221	40	18%
Industri / Industry	134	2	1.8%
Limbah / Waste	250	15	5.9%
Total	2950	767	26%

Untuk mencapai target penurunan emisi GRK pada tahun 2020 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Dalam RAN GRK ini, pembiayaan kegiatan mitigasi dan adaptasi tidak saja dialokasikan dari sektor publik, tetapi juga mengikutsertakan kontribusi pembiayaan dari sektor swasta. Laporan *Indonesia's First Mitigation Fiscal Framework*³ menjabarkan biaya indikatif kegiatan mitigasi dan adaptasi seperti dijabarkan dalam Grafik 2 berikut ini:

To achieve the GHG emission reduction target by 2020, the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 61 of 2011 concerning the National Action Plan for the Reduction of Greenhouse Gas Emission was issued. The GHG Emission Reduction Action Plan not only allocates funding for mitigation and adaptation activities from the public sector, but also includes funding contribution from the private sector. A breakdown of the said funding for mitigation and adaptation activities as set forth in the *Indonesia's First Mitigation Fiscal Framework*³ Report can be viewed in Table 2 below:

1 Lukita Dinarsyah Tuwo, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Presentasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, acara Penjaringan Aspirasi Masyarakat sebagai Masukan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, Pontianak, 20 Februari 2014.

2 Irfa Amri, PhD, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Pendanaan Perubahan Iklim Indonesia, Presentasi pada Diskusi Publik Kesiapan Indonesia Menghadapi Perundingan Perubahan Iklim Doha, 19 Desember 2012.

3 Diolah dari laporan Ministry of Finance (2012) *Indonesia's First Mitigation Fiscal Framework*.

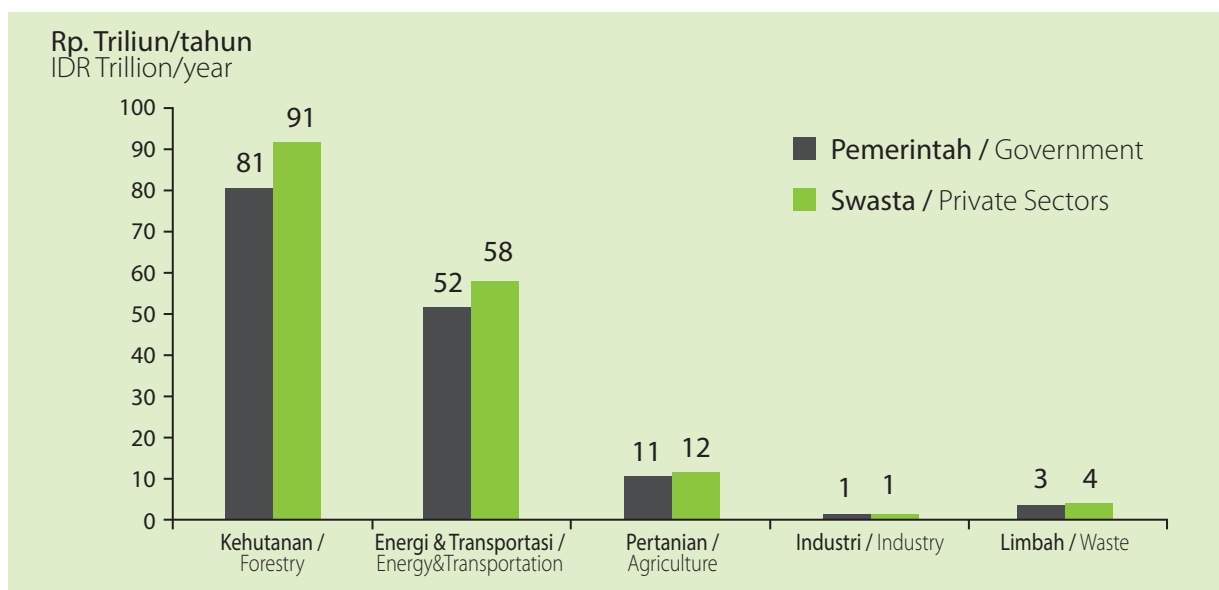
1 Lukita Dinarsyah Tuwo, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, Presentation on the Technocratic Design of the RPJMN for the period of 2015-2019, delivered in the event on Mapping of the Community's Aspiration to Serve as Inputs to the Technocratic Design of the RPJMN 2015-2019, Pontianak, 20 February 2014.

2 Irfa Amri, PhD, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Climate Change Funding in Indonesia, Presentation in the Public Discussion on Indonesia's Preparedness in Approaching the Doha Climate Change Negotiation, 19 December 2012.

3 Data was derived from Ministry of Finance (2012) *Indonesia's First Mitigation Fiscal Framework*.

Grafik 2. Biaya Indikatif terkait Kontribusi Sektor bagi Penurunan Emisi GRK⁴

Graphic 2. Indicative Costs related to Sectors Contribution towards the Targeted GHG Emissions Reduction⁴



Total pendanaan kegiatan untuk mendukung penurunan emisi GRK sebanyak 26% pada tahun 2020, secara indikatif adalah sebesar Rp. 314 triliun per tahun atau sebesar Rp. 1.570 triliun selama 2015-2019. Sumber pendanaan aktivitas RAN GRK ini diharapkan sebanyak 47% berasal dari pemerintah dan sebanyak 53% berasal dari pihak swasta.

Total funding to support the reduction of GHG emissions by 26% by 2020 is estimated to be at Rp. 314 trillion per year, or Rp. 1,570 trillion for 2015-2019. Government funding is expected to cover as much 47% of the total funding needed and as much as 53% comes from the private sector financing.

Keterlibatan sektor swasta dalam mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial juga diatur dalam **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain mengatur kewajiban bagi industri untuk melindungi alam dan lingkungan hidup. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 68 yang mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk:

Private sector involvement in managing environmental and social risks is also governed under **Law Number 32 of 2009** concerning Environmental Protection and Management which among others regulate the obligations of industries to protect nature and the environment. This obligation is stated in Article 68, which requires every person conducting business and/or activities to:

- memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- provide information relating to the environmental protection and management in a correct, accurate, transparent, and timely manner;
- sustain environmental functions; and
- comply with the provisions on environmental quality standards and/or standard criteria to avoid environmental damages.

⁴ Ibid.

⁴ Ibid.

Adapun sanksi administratif bagi pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum pada pasal 71 hingga pasal 83, yang antara lain mencantumkan sanksi penghentian operasional maupun pencabutan ijin lingkungan hidup, dimana ijin lingkungan hidup ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha. Selanjutnya pasal 97 hingga pasal 120 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman hukuman penjara maupun denda.

Pasal 1 ayat 33 UU PPLH No. 32/2009 ini juga mengatur mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup ini mencakup:

1. **Insentif dan disinsentif** bagi sektor jasa keuangan seperti bank, industri keuangan non bank, dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup, pendanaan jasa lingkungan hidup dan asuransi lingkungan hidup.
2. **Pendanaan**, yang mengatur mengenai dana jaminan pemulihan untuk sektor tambang, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan serta dana amanah atau bantuan untuk konservasi
3. **Perencanaan** yang mengatur PDB/PDRB, kompensasi imbal jasa antar daerah, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta internalisasi biaya lingkungan hidup.

Pada saat penyusunan *roadmap* ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015 -2024. Dalam draft MPSJKI ini dicantumkan sektor **industri, energi, pertanian, infrastruktur dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** sebagai sektor prioritas yang ditingkatkan porsi pendanaannya untuk mendukung pencapaian RPJP 2005-2025 dan RPJM 2015-2019. Kebutuhan pendanaan pada sektor-sektor tersebut dilakukan melalui perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non-bank (IKNB).

The administrative sanctions for violations of environmental protection and management are stated in Article 71 to Article 83, which among others include cancellation of operational license and environmental permit. The environmental permit is a main requirement to obtain a business license. Furthermore, Article 97 to Article 120 list criminal sanctions for violations of environmental protection and management, which includes imprisonment or fines.

Article 1, paragraph 33 of Law No. PPLH 32/2009 also regulates the environmental economic instruments, which is a set of economic policies to encourage the Government, local government, or any person towards environment conservation. Environmental economic instruments include:

1. **Incentive and disincentives** that require financial institutions and capital market to comply with environmentally friendly practices, to provide financing for environmental services and to develop insurance scheme support environmentally friendly practices.
2. **Financing**, which regulates the guarantee fund for recovery activities in the mining sector, fund for pollution prevention and/or environmental damage and recovery as well as trust funds for conservation activities.
3. **Planning** which regulates GDP and regional GDP, compensation fee for inter-provincial activities, balance of natural resources/environment and internalization of environmental costs.

At the time of the development of this roadmap, the Financial Service Authority (OJK) is preparing a Master Plan for Indonesia's Financial Service Sector (MPSJKI) for the period of 2015 -2024. This MPSJKI draft identified the **industry, energy, agriculture, infrastructure and Micro Small and Medium Enterprises (MSME)** sectors as the priority sectors that were granted an increased funding portion to support the achievement of the Long Term Development Plan / RPJP (2005-2025) and Medium Term Development Plan / RPJM for the period of 2015-2019. The financing needs of those sectors are envisioned to be obtained through banking, capital market as well as non bank financial industry (IKNB) activities.

Untuk meningkatkan pendanaan di sektor-sektor prioritas tersebut diperlukan dukungan regulasi, pengawasan LJK yang memadai serta infrastruktur yang mendukung. Pembangunan infrastruktur ini terutama terkait penyediaan informasi dan peningkatan kapasitas praktisi LJK serta pemrakarsa proyek dalam hal analisa pendanaan dan penilaian risiko proyek.

Peningkatan pendanaan dalam industri perbankan antara lain dilakukan melalui **penetapan persentase tertentu** dari total portofolio pendanaan masing-masing bank untuk mendukung sektor prioritas serta **penugasan kepada bank tertentu** yang dinilai memiliki kemampuan dibidang tertentu. Penetapan persentase tertentu dan penugasan bank akan ditetapkan setelah kajian yang melibatkan OJK dan instansi terkait antara lain BI dan Kementerian yang membidangi sektor prioritas. Salah satu program peningkatan pendanaan tersebut adalah program *Pollution Abatement Equipment* (PAE Program) yang memberikan bantuan keuangan untuk membiayai lingkungan hidup dengan mudah dan murah.

Sedangkan peningkatan pendanaan dalam konteks pasar modal dapat dilakukan dengan membentuk indeks saham berbasis pada lingkungan hidup (*Green Index*), serta daftar perusahaan *go public* yang ramah lingkungan hidup (*green list*). Indeks saham yang ramah lingkungan hidup juga akan menaikkan reputasi atau nama baik dari suatu perusahaan sehingga akan memudahkan dalam memperoleh pendanaan sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pada usahanya.

Dari IKNB, peningkatan pendanaan dapat dilakukan dengan cara mendorong para pelaku usaha untuk mengasuransikan usahanya dalam rangka meminimalisir risiko lingkungan hidup. Selain itu, pelaku usaha juga diajak untuk merancang produk asuransi yang ramah lingkungan hidup sehingga masyarakat memiliki pilihan produk yang semakin beragam.

Regulatory supports along with sufficient Financial Service Institutions oversight as well as supporting infrastructure are essential to increase funding in the aforementioned priority sectors. Development of the supporting infrastructure should mainly focus on the provision of information and improvement of the capacity of the Financial Service Institution's practitioners as well as the project proponents in the area of project financing analysis and risk assessment.

Financing increase in the banking industry is done by means of **requiring a specific percentage** of the total financing portofolio of each bank to be allocated to support the priority sectors and **assigning certain banks** who are deemed equipped with capabilities in specific areas. The determination of such specific percentage and assignment to certain banks will be made based on an evaluation involving OJK and other relevant agencies that includes BI and the Ministries overseeing the priority sectors. One of the financing increase programs is the Pollution Abatement Equipment program (PAE Program) which provided financial assistance to support simple and affordable environmental financing.

Whereas financing increase in the context of capital market can be done by developing an environmentally based share index (*Green Index*), and a list of environmentally friendly listed companies (*Green List*). An environmentally friendly share index will also help boost the reputation or image of a company that will help them in securing financing as well as encouraging improvement in the environmental management of business activities.

In the Non Bank Financial Industry sector (IKNB), financing increase can be done by encouraging the industry players to insure their business within the framework of minimizing environmental risk. In addition, the industry players are also encouraged to design an environmentally friendly insurance product to provide greater variety of product options to the public.

B. Tujuan Penyusunan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan

Tujuan Penyusunan *Roadmap*

Roadmap ini berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah otoritas OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. *Roadmap* keuangan berkelanjutan ini akan menjadi bagian dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) serta digunakan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan keuangan berkelanjutan lainnya.

Roadmap ini disusun untuk:

- Menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (5 tahun) dan panjang (10 tahun) untuk sektor jasa keuangan yang berada di bawah otoritas OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB.
- Menentukan dan menyusun tonggak perbaikan terkait keuangan berkelanjutan.

Penyempurnaan terhadap isi *Roadmap* ini dimungkinkan dalam hal terdapat perubahan baik internal maupun eksternal OJK.

B. Objective of the Development Of The *Roadmap* On Sustainable Finance

Objective of the *Roadmap*'s Development

This roadmap sets forth the detailed work plan on the sustainable finance program for the financial service industry as governed under the authority of OJK, namely the banking, capital market and Non Bank Financial Service Industry (IKNB) sectors. This roadmap on sustainable finance will constitute as part of the Master Plan for Indonesia's Financial Service Sector (MPSJKI) which is scheduled to be published by December 2015 and will serve as a reference for other stakeholders in the sustainable finance program.

This roadmap is prepared to:

- Set forth the end goal relating to sustainable finance in Indonesia to be achieved by 2024 for financial institutions governed under OJK's authority, namely the banking, capital market and Non Bank Financial Service Industry (IKNB) sectors.
- Determine and prepare the benchmark for improvements relating to sustainable finance up to 2024.

Specify the measures and recommendations that need to be adopted in the form of an integrated work plan involving all financial service institutions. This work plan may be revised and adjusted periodically as deemed necessary.



Bab 2. Tujuan dan Prinsip Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Chapter 2. Goal and Principle of Sustainable Finance In Indonesia

A. Definisi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup⁵.

Keuangan berkelanjutan terdiri dari dimensi:

1. Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya;
2. Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
3. Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan
4. Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

B. Tujuan dan Prinsip Keuangan Berkelanjutan

Tujuan program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Daya tahan dikaitkan dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik, sementara daya saing dikaitkan dengan kemampuan LJK untuk melakukan inovasi produk/layanan lingkungan hidup yang ramah lingkungan hidup;

A. Definition of Sustainable Finance in Indonesia

Sustainable finance in Indonesia is defined as comprehensive support from the financial service industry to achieve sustainable development resulted from a harmonious relationship between economic, social and environmental interests⁵.

Sustainable finance comprised of the following dimensions:

1. Achieve industry, social and economic superiority in order to address the threats of global warming and mitigate other environmental and social issues;
2. Aims to encourage the shifting of the target towards a competitive low carbon economy;
3. Strategically promoting environmentally friendly investment in various business/ economic sectors; and
4. Supporting the principles of development in Indonesia as stated in the RPJM, namely the 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, and pro-environment*).

B. Goal and Principle of Sustainable Finance

The goal of the sustainable finance program in Indonesia is to:

1. Improve the Financial Service Industry (FSI)'s resilience and competitiveness to enable them to grow and develop in a sustainable manner. Resilience is associated with improved FSIs ability in risk management, while the competitiveness is associated with FSIs ability to innovate and produce environmentally friendly products/ services.;

⁵ Definition of Sustainable Finance in Indonesia, 2014, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Regional Economic Development Program (RED)

2. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu kepada RPJP dan RPJM yang bercirikan *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*;
3. Berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (*global warming*) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif

Prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia mencakup:

- 1. Prinsip Pengelolaan Risiko** yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko LJK guna menghindari, mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional LJK.
- 2. Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas berkelanjutan** yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial; serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
- 3. Prinsip Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sosial dan Pelaporan** dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional LJK dan terhadap praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-nasabah LJK; serta secara berkala melaporkan kemajuan LJK dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat.

2. Provide financing resources required by the public by using the pro-growth, pro-job, pro-poor and pro-environment RPJP and RPJM as points of reference; and
3. Contributes to the national commitment to address the global warming challenge by carrying out climate change mitigation and adaptation in business activities towards a competitive low carbon economy.

The principles of sustainable finance program in Indonesia comprise of the following:

- 1. Risk Management Principle** which integrates aspects of environmental and social protection in FSI's risk management to avoid, mitigate and minimize the negative impacts that may arise and promote increased value in the FSI's financing and operational activities.
- 2. Sustainable Priority Economic Sector Development Principle** that is inclusive by increasing financing activities primarily in the industry, energy, agriculture (in the broadest sense), infrastructure and MSME sectors and at the same time striking a balance between the economic, environmental and social aspects; and provides financial services to the community who has limited or no access to financial services in the formal sector.
- 3. Environmental and Social Governance and Reporting Principle** by implementing robust and transparent environmental and social governance practices in the Financial Service Institution's operational activities as well as ensuring that the same environmental and social governance practices are implemented by the FSI's clients; and periodically reports the progress of FSIs in implementing the principles of sustainable finance to the public.

4. **Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif** dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.

Definisi dan prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia ini dapat direvisi berdasarkan masukan dari berbagai pihak terutama dari Kementerian terkait dan industri jasa keuangan dan dituangkan dalam kebijakan/regulasi OJK (lihat Tabel Rencana Kerja Keuangan Berkelanjutan).

4. **Capacity Enhancement and Collaborative Partnership Principle** by developing human resource, information technology and the operational capacity of each relevant LSI in implementing the principles of sustainable finance; and establishes cooperation between the FSIs, regulator, government and leverages on the partnership with domestic and international institutions to advance progress in the area of sustainable finance.

This definition and principles of sustainable finance in Indonesia may be revised based on inputs from various parties especially the relevant Ministries as well as financial service institutions and set forth in the form of policy/regulation issued by OJK (see Chapter 3, Chart on Implementation Plan).



Bab 3. Rencana Kerja Strategis Dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan

Chapter 3. Strategic Work Plan and Implementation towards Strengthening Sustainable Finance

Rencana kerja strategis keuangan berkelanjutan meliputi (3) tiga area yang mencakup:

1. Peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan hidup.
2. Peningkatan *demand* bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup.
3. Peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

Fokus aktivitas di atas diterapkan secara bertahap dalam Jangka Menengah dan Jangka Panjang, dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Jangka Menengah (2015-2019)**, kegiatan penguatan keuangan berkelanjutan difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan serta kompetensi sumberdaya manusia pelaku industri jasa keuangan, pemberian insentif serta koordinasi dengan instansi terkait.
- 2. Jangka panjang (2020-2024)**, kegiatan difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan.

Beberapa kondisi terkait penerapan keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai berdasarkan jangka menengah dan jangka panjang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- A. Dalam Jangka Menengah (2015-2019) diharapkan kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan telah terbangun dan berjalan dengan baik. Pemahaman, pengetahuan serta kompetensi sumberdaya manusia pelaku industri jasa keuangan terkait keuangan berkelanjutan juga diharapkan telah meningkat serta pemberian insentif serta koordinasi dengan instansi terkait telah terjalin secara baik dan dilakukan secara berkala. Juga diharapkan telah terbentuknya sistem untuk memonitor peningkatan volume pendanaan di sektor ekonomi prioritas yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Strategic activities to implement sustainable finance in Indonesia comprise of (3) three focus area as follows:

1. Increase supply of environmentally friendly financing.
2. Increase demand of environmentally friendly financing products.
3. Increase oversight and coordination of sustainable finance implementation.

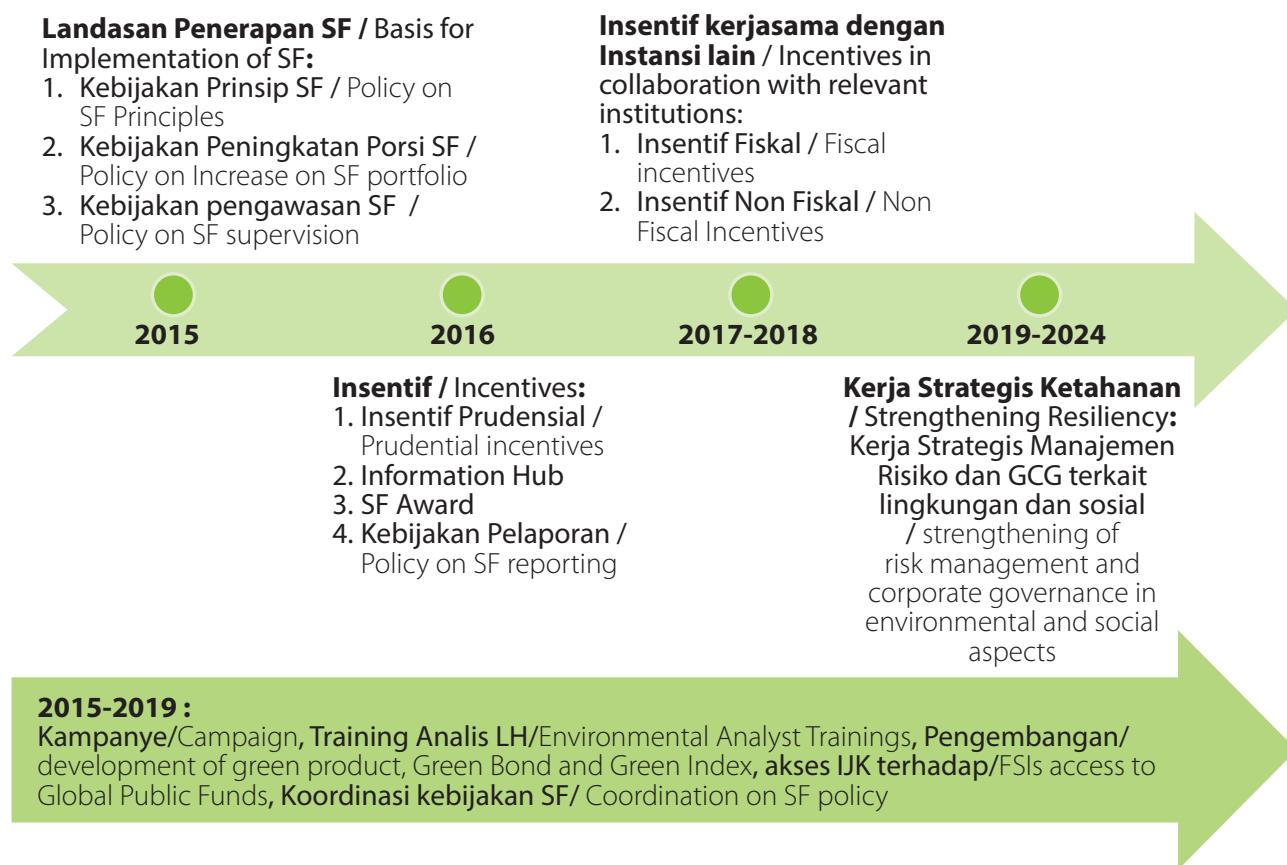
The above strategic activities will be implemented gradually in the Medium Term and Long Term, as described below:

- 1. Medium Term (2015-2019)**, the strengthening of sustainable finance will focus on the basic regulatory framework and reporting system, increase understanding, knowledge and competence of the human resources in the financial services industry, provision of incentives and coordination with related agencies.
- 2. Long Term (2020-2024)**, the activities will focus on integrated risk management, corporate governance, bank rating, and the development of an integrated sustainable finance information system.

A number of expected accomplishments in the implementation of sustainable finance in the medium term and long term are as follows:

- A. In the Medium Term (2015-2019) the basic regulatory framework and reporting system are expected to be established and running well. The understanding, knowledge and competence on sustainable finance of the human resources in the financial services industry are expected to increase and the provision of incentives and coordination with related agencies have been well executed and carried out regularly. A system to monitor the increase in financing volume of priority economic sectors that adapt sustainable finance principles is expected to be established.

Grafik 3. Roadmap Keuangan Berkelanjutan
Graphic 3. Roadmap for Sustainable Finance



B. Dalam Jangka Panjang (2020-2024), LJK diharapkan telah mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko dan tata kelola perusahaan serta melaporkan kemajuan penerapan keuangan berkelanjutan secara berkala kepada masyarakat. Sistem informasi terpadu dengan institusi terkait untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan telah terbentuk dan berjalan dengan baik. Diharapkan juga bahwa program keuangan berkelanjutan ini dapat meningkatkan kontribusi terhadap target kerja strategis emisi gas rumah kaca nasional.

Target dan rencana kegiatan di masing-masing area rencana kerja strategis selanjutnya disesuaikan dengan kondisi tiap bidang pengawasan di bawah OJK yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Berikut adalah uraian rencana kerja strategis keuangan berkelanjutan:

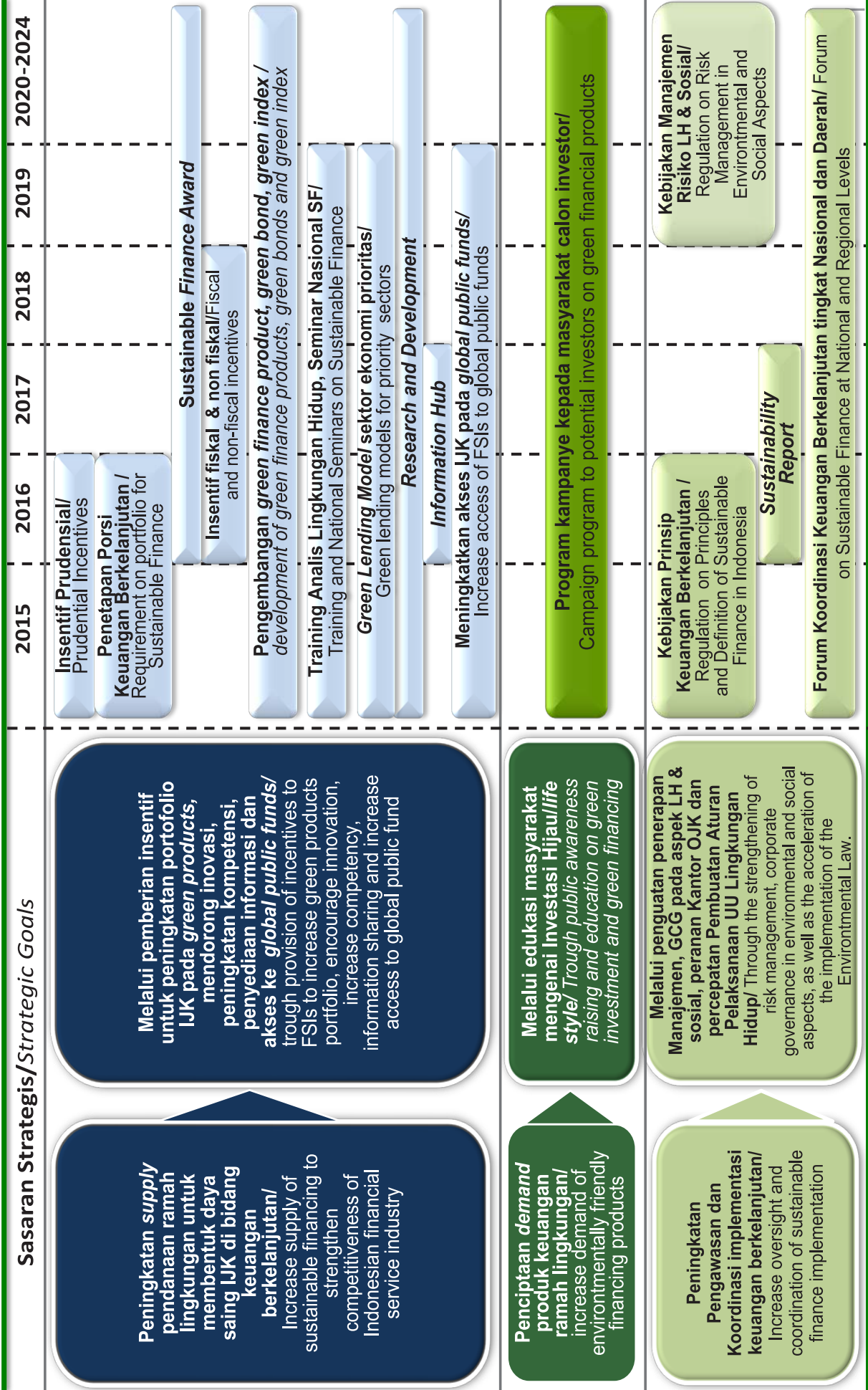
Grafik 4 menjelaskan mengenai capaian *roadmap* dalam jangka menengah dan jangka panjang.

B. In the Long Term (2020-2024), FSIs are expected to have integrated environmental and social aspects in its risk management and corporate governance, and provide regular progress reports on sustainable finance implementation to the public. An integrated information system with relevant institutions to support the implementation of sustainable finance has been established and running well. The sustainable finance program is also expected to contribute to reducing the national greenhouse gas emission.

Further adjustments of the target and activity plan for each focus area will be made to align with each area of oversight managed by OJK namely on the banking, capital market and Non Bank Financial Service Industry (IKNB). The following are the breakdown of the strategic activities to implement sustainable finance:

Graphic 4 describe the roadmap achievements in the medium term and long term.

Grafik 4. Rencana Kerja Strategis Keuangan Berkelanjutan
Graphic 4. Strategic Activities to Implement Sustainable Finance



A. Peningkatan *Supply* Pendanaan Keuangan Berkelanjutan

Peningkatan *supply* pendanaan keuangan berkelanjutan ditujukan untuk meningkatkan daya saing IJK di Indonesia dalam pengembangan keuangan berkelanjutan. Peningkatan *supply* ini memerlukan dukungan kebijakan serta insentif untuk mendorong peningkatan volume pendanaan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, mendorong inovasi pengembangan produk ramah lingkungan hidup, peningkatan kompetensi dan penyediaan akses informasi serta akses penggunaan dana publik internasional (*global public fund*).

Cakupan insentif terkait penerapan keuangan berkelanjutan dapat meliputi:

- Pengembangan insentif fiskal maupun non-fiskal termasuk penyusunan kajian mengenai pembentukan *fund* dan instrument insentif yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan/investasi sektor ekonomi prioritas berkelanjutan. Insentif ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses pendanaan dari IJK kepada nasabah.
- *Workshop* dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi IJK dalam meningkatkan kegiatan pendanaan/investasi pada sektor ekonomi prioritas keuangan berkelanjutan.
- Pengembangan produk dan/atau skema untuk pendanaan/investasi dalam rangka peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan termasuk kajian produk, pengembangan pedoman pendanaan/investasi untuk memudahkan SDM IJK melakukan analisa kelayakan pendanaan/investasi pada sektor ekonomi prioritas berkelanjutan.
- Pemberian *award* tahunan kepada IJK yang dinilai memenuhi standar terbaik dalam menerapkan keuangan berkelanjutan.

A. Increase Supply of Sustainable Financing

The increase in supply of sustainable financing aims to enhance FSIs competitiveness in sustainable finance development in Indonesia. This increase in supply requires regulatory support and incentives to increase the volume of sustainable financing in the priority economic sectors, to encourage innovation in developing environmentally friendly products, to improve the quality and provision of access to information and access to the use of global public fund.

Incentives linked to the implementation of the sustainable finance program in general comprise of the following:

- Development of incentives, both fiscal as well as non-fiscal incentives, including conducting assessments on the establishment of incentive fund and instruments that addresses the sustainable financing/investment needs in the priority economic sector. This incentive also aims to increase the efficiency of the funding process from FSIs to its clients.
- Workshop and training to enhance FSIs competencies to increase financing/investment activities in the sustainable finance priority economic sector;
- Development of financing/investment products and/or schemes with the aim to increase the sustainable finance portfolio including product assessment, development of the financing/investment guideline to support the FSI's staffs in conducting analysis of the feasibility of implementing sustainable financing/investment in the priority economic sector;
- Annual awards to FSIs deemed to have set the highest standard in implementing sustainable finance.

- Penerapan keuangan yang berkelanjutan memerlukan dukungan infrastruktur berupa sistem teknologi informasi untuk efektifitas penerapan keuangan berkelanjutan. Sistem teknologi informasi ini difokuskan pada interkoneksi informasi antara OJK dengan kementerian terkait.

Beberapa kegiatan insentif tersebut dikembangkan dan diselenggarakan bekerjasama dengan kementerian dan instansi terkait termasuk emiten pasar modal dan Bursa Efek Indonesia serta lembaga internasional.

B. Peningkatan *Demand* bagi Produk Keuangan Berkelanjutan

Salah satu kendala dalam peningkatan pendanaan sektor ekonomi prioritas yang ramah lingkungan hidup adalah masih kurangnya pemahaman pasar/pelaku bisnis mengenai potensi pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan hidup serta penilaian dan mitigasi risiko dari proyek-proyek tersebut. Kurangnya pemahaman akan manajemen risiko dan mitigasi yang dapat dilakukan menjadikan pelaku bisnis kurang antusias untuk menjadi pelaksana awal (*first movers*) dalam proyek-proyek ramah lingkungan hidup; selain kurangnya penyebaran informasi dan *lessons learned* dari pelaksanaan proyek-proyek ramah lingkungan hidup di negara lain.

Untuk meningkatkan pemahaman publik secara umum mengenai keuangan berkelanjutan sangat diperlukan pelaksanaan program kampanye dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala, terstruktur dan tepat sasaran. Kampanye dan sosialisasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pendanaan yang ramah lingkungan hidup melalui pendanaan pasar modal dan penggunaan produk-produk keuangan yang ramah lingkungan hidup.

Kegiatan sosialisasi dan training yang dilakukan secara berkala oleh lembaga training yang kompeten juga diperlukan untuk meningkatkan potensi pelaksana proyek ramah lingkungan hidup.

- The support of sufficient infrastructure in the form of information technology system is necessary to facilitate the effective implementation of the sustainable finance program. The information technology system should focus on establishing interconnectivity of information between OJK and other relevant ministries.

A number of the aforementioned incentives are carried out in collaboration with the relevant ministries and agencies including issuers in the capital market sector and the Indonesia Stock Exchange as well as international agencies.

B. Increase in Demand for Sustainable Finance Products

One of the obstacles in increasing environmentally friendly financing in priority economic sectors is the lack of understanding of the market/businesses on the financing potential of environmentally friendly projects as well as risk assessment and mitigation of these projects. The lack of understanding of risk management and mitigation that can be done make businesses less enthusiastic in becoming first movers of environmentally friendly projects; in addition there is also a lack of dissemination of information and lessons learned on the implementation of environmentally friendly projects in other countries.

Regular, structured and targeted outreach campaign and socialization program is required to increase public understanding on sustainable finance. This outreach and socialization also aims to enhance the community's active role in increasing environmentally friendly financing through capital market financing and the use of environmentally friendly financial products.

Regular socialization and training by a competent training institution is required to increase potential of environmentally friendly project implementers.

C. Pengawasan Implementasi Keuangan Berkelanjutan serta Koordinasi dengan Instansi Terkait

Pengawasan implementasi program keuangan berkelanjutan ini dilakukan melalui upaya penguatan penerapan manajemen risiko, tata kelola perusahaan dalam aspek lingkungan hidup dan sosial, serta mempercepat aturan pelaksanaan UU Lingkungan Hidup. Payung kebijakan berikut untuk mendukung penerapan program keuangan berkelanjutan:

- a. Kebijakan umum terkait Prinsip Keuangan Berkelanjutan yang mengatur kewajiban LJK untuk memperhatikan keseimbangan 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*), perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam, serta partisipasi semua pihak dalam setiap kegiatan pendanaan di Indonesia.
- b. Kebijakan yang mengatur kewajiban IJK untuk menerbitkan *sustainability report* bersama dengan laporan tahunan dimana penerapan kebijakan ini akan disesuaikan dengan kesiapan dari masing-masing bidang pengawasan.
- c. Kebijakan yang mengatur manajemen risiko aspek lingkungan hidup dan sosial dalam kegiatan pendanaan yang dilakukan LJK.

Penerapan masing-masing kebijakan diatas, memerlukan kajian yang menghasilkan kebijakan/regulasi khusus bagi penerapan yang efektif pada masing-masing bidang pengawasan terutama perbankan dan IKNB seperti kebijakan/regulasi manajemen risiko, target peningkatan portofolio pendanaan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, pelaporan serta pengawasan penerapan keuangan berkelanjutan dan penilaian tingkat kesehatan perbankan/IKNB. Dalam bidang pengawasan pasar modal, kebijakan/regulasi khusus yang diperlukan adalah kajian serta kebijakan/regulasi terkait mekanisme pelaporan keuangan berkelanjutan.

Selain itu, penerapan program keuangan berkelanjutan memerlukan koordinasi antar-pelaku untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinergi yang baik antara kementerian maupun

C. Oversight of Sustainable Finance Implementation and Coordination with the Relevant Ministries/Agencies

The oversight of the sustainable finance program implementation will be done through the strengthening of risk management, corporate governance in environmental and social aspects, as well as the acceleration of the implementation of the Environmental Law. The policy/regulation umbrella to support the implementation of sustainable finance shall comprise of:

- a. General policies on Sustainable finance Principles that governs the FSI's obligations to observe the balance of the 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, and pro-environment*), protection and management of natural resources, as well as all parties' participation in every financing activities in Indonesia.
- b. Policies governing the FSI's obligations to issue a sustainability report together with the annual report based on which the implementation of this policy will be adjusted to line up with each oversight division's level of readiness.
- c. Risk management policies governing the environmental and social aspects of the FSIs financing activities.

The execution of the above mentioned policies require an assessment that will result in specific policies/regulations to support the effective implementation of the sustainable finance program in each oversight division, especially in the banking and non-banking financial service industry (IKNB) such as risk management policy/regulation, target to increase the sustainable financing portfolio in the priority economic sectors, reporting as well as oversight on the implementation of the sustainable finance program and evaluation on the banks/non-bank financial service industry's level of soundness. With respect to capital market supervision, there is a requirement for specific policies/regulations governing the reporting mechanism on sustainable financing.

Furthermore, the implementation of the sustainable finance program requires coordination among the players to ensure effective integration and synergy among the ministries as well as between the national

antara pemerintah pusat dan daerah. Unsur koordinasi yang baik dengan semua instansi untuk mencegah beberapa kendala umum (*bottle neck*) yang kerap dihadapi dalam setiap pelaksanaan pembangunan, antara lain:

1. Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.
2. Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses pelaksanaan.
3. Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (*safe guarding*).
4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kementerian dan institusi yang terkait dalam program keuangan berkelanjutan antara lain Kementerian (Perindustrian, Pertanian, Koperasi dan UKM, Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM, Keuangan, Perencana Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Pekerjaan Umum), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan lembaga penegakan hukum.

Beberapa hal utama yang perlu dikoordinasikan terkait penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah:

1. Solusi atas kendala umum (*bottle neck*) yang kerap dihadapi dalam setiap pelaksanaan program keuangan berkelanjutan pada masing-masing kementerian terkait.
2. Penetapan target pendanaan/investasi untuk masing-masing sektor ekonomi prioritas berkelanjutan setiap tahun.
3. Monitoring dan evaluasi pencapaian secara periodik termasuk perlu dibangunnya sistem teknologi informasi untuk mendukung pengawasan penerapan keuangan berkelanjutan.
4. Koordinasi kebijakan dan peraturan diharapkan akan menghasilkan poin-poin konkrit untuk menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung penerapan program keuangan berkelanjutan yang efektif.
5. Pengembangan insentif baik insentif fiskal maupun non-fiskal termasuk penyusunan kajian mengenai pembentukan fund dan instrument insentif yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan/investasi sektor ekonomi prioritas berkelanjutan.

and sub national governments. Seamless inter agencies coordination will help prevent the occurrence of bottle necks that often comes hand in hand with development activities, such as among others:

1. Weak coordination in managing data and information, thus halting efforts to achieve the target.
2. Weak correlation between the planning, budgeting and implementation process.
3. Weak monitoring, evaluation and safeguarding system.
4. Lack of coordination between the national and sub national government.

The ministries and agencies relevant to the sustainable finance program includes, among others, Ministries (Industry, Agriculture, Cooperatives and SME, Energy and Mineral Resources, Finance, National Development Planning/BAPPENAS, Public Works), Indonesia Stock Exchange (BEI) and Law Enforcement Agencies.

Some of the key issues that require coordination with respect to the implementation of sustainable finance in Indonesia are:

1. Solution to bottle necks frequently faced by each of the relevant ministries in implementing the sustainable finance program.
2. Determination of the sustainable financing/ investment target for each priority economic sector on an annual basis.
3. Monitoring and evaluation of periodical achievements, including identifying the need to develop the supporting information technology system to supervise the implementation of sustainable finance.
4. Policy and regulatory coordination is expected to generate concrete action points to promulgate rules and policies that support the effective implementation of the sustainable finance program.
5. Development of incentives, both fiscal as well as non-fiscal incentives, including conducting assessments on the establishment of incentive fund and instruments that addresses the sustainable financing/investment needs in the priority economic sector.

Dalam rangka koordinasi, pertukaran informasi serta untuk mendapatkan masukan dari IJK dan pemangku kepentingan terkait lainnya atas penyempurnaan kebijakan/regulasi, insentif dan pembangunan infrastruktur, diperlukan adanya forum keuangan berkelanjutan yang diselenggarakan secara berkala, paling sedikit dua kali dalam setahun. Forum koordinasi keuangan berkelanjutan ini diadakan pada tingkat pusat dan daerah. Selain itu, forum ini juga dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi penerapan keuangan berkelanjutan di IJK.

Berikut adalah bagan rekomendasi dan implementasi yang akan menjadi acuan pelaksanaan aktivitas program keuangan berkelanjutan.

To facilitate the coordination and exchange of information relating to sustainable finance as well as to gauge feedbacks from the FSIs and other relevant stakeholders to refine the policy/regulation, incentives and infrastructure development, it is deemed necessary to establish a periodically organized sustainable finance forum, at least twice a year. This sustainable finance coordination forum will be held at the national and regional levels. In addition, this forum can also serve as a vehicle to monitor and evaluate the implementation of sustainable finance by the FSIs.

The following are the chart of implementation plan that will guide the implementation activities of the sustainable finance program.



Tabel Rencana Kerja Keuangan Berkelanjutan Implementation Plan

No	Rencana Kerja / Activity	Tahun / Implementation Year	Keterangan / Note
1	Kebijakan Prinsip dan definisi Keuangan Berkelanjutan	2015-2016	1. Membuat kebijakan/aturan yang menjadi payung kebijakan keuangan berkelanjutan 2. Membuat panduan pengawasan implementasi keuangan berkelanjutan
1	Regulation on Principles and Definition of Sustainable Finance in Indonesia	2015-2016	1. Issuance of an umbrella policy and regulation on sustainable finance, setting forth the definition and principles. 2. Development of supervision guidelines on sustainable finance program implementation.
2	Kebijakan Porsi Keuangan Berkelanjutan	2015-2016	Membuat kebijakan/aturan yang mendorong LJK untuk menyalurkan pembiayaan ramah lingkungan hidup, Contoh peningkatan porsi pembiayaan ramah lingkungan hidup dengan insentif ijin penurunan porsi pembiayaan produktif. Peningkatan pembiayaan ramah lingkungan hidup dapat dilakukan untuk sektor produktif maupun konsumtif.
2	Policy and Regulation on portfolio of Sustainable Finance	2015-2016	Development of Policies/Regulations to increase financial service institutions portfolio on sustainable finance. For example, by providing incentives to increase sustainable finance portfolio and special allowance to reduce productive portfolio. Increase of sustainable financing can be applied on both productive and consumptive sectors.
3	Insentif Prudensial	2015-2016	Memberikan insentif prudensial antara lain: ATMR dengan memperhatikan mekanisme mitigasi risiko
3	Prudential Incentives	2015-2016	Provision of prudential incentives such as certain level of risk-based balanced asset (ATMR) in consideration of risk mitigation mechanism.
4	Insentif Fiskal	2016-2018	Mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal seperti <i>tax holiday</i> dan <i>feed-in-tariff</i> ,
4	Fiscal Incentives	2016-2018	Provision of fiscal incentives such as tax holiday and feed-in-tariff in collaboration with relevant ministries.
5	Insentif Non Fiskal	2016-2018	Mendorong pemerintah memberikan insentif non-fiskal seperti kredit program dan penjaminan
5	Non-fiscal Incentives	2016-2018	Provision of non-fiscal incentives such as targeted loans and guarantee scheme in collaboration with relevant ministries.

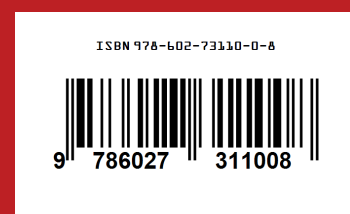
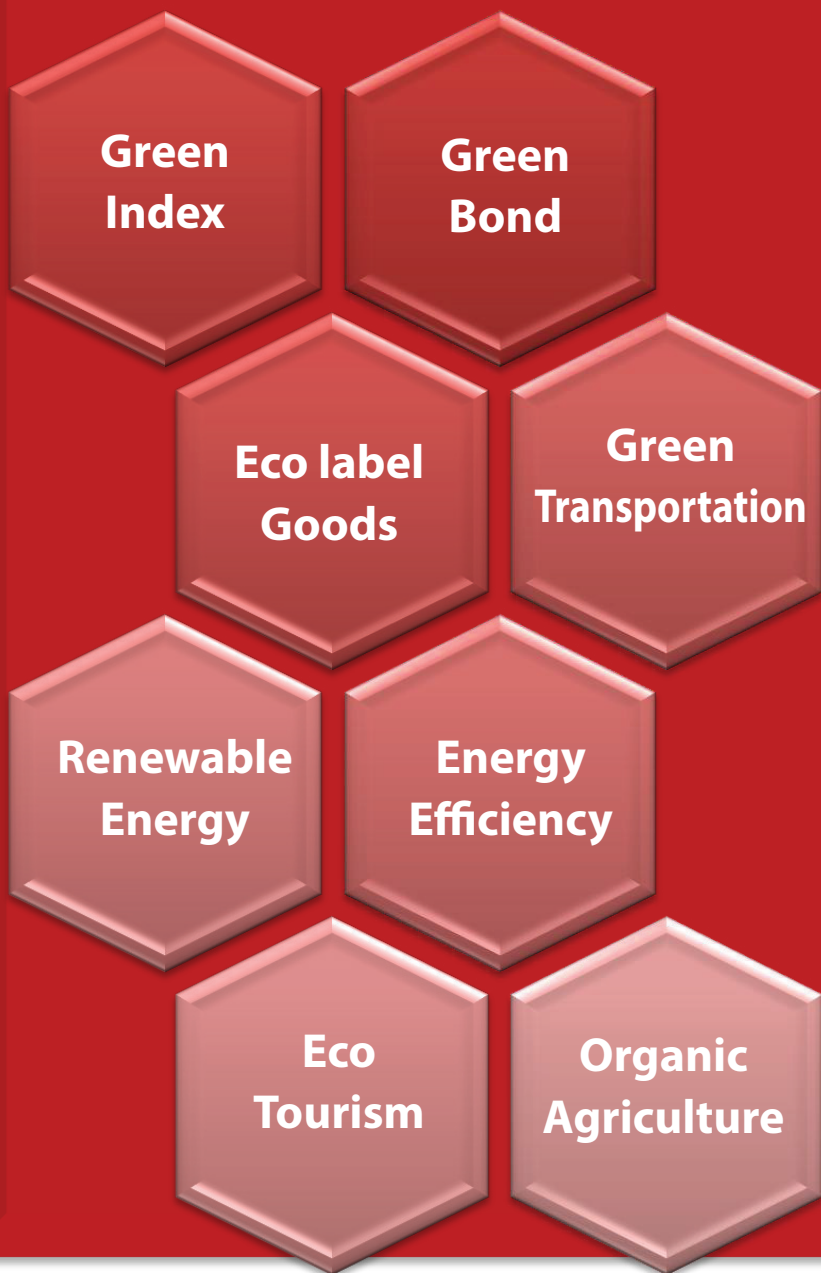
No	Rencana Kerja / Activity	Tahun / Implementation Year	Keterangan / Note
6	Information Hub Keuangan Berkelanjutan	2016	Menyediakan informasi terpadu keuangan berkelanjutan a.l. informasi dari kementerian terkait kepada LJK, <i>green lending model</i> , informasi produk yang dimanfaatkan untuk kepentingan LJK, pengawasan, pemerintah & masyarakat melalui <i>microsite</i> pada website OJK
6	Information Hub on Sustainable Finance	2016	Development of integrated information system on Sustainable Finance i.e. key information for FSI provided by relevant ministries, green lending models, information on new financial products and supervision procedures. The information is available for FSI, government officials and wider audience and presented in a microsite at OJK website.
7	Sustainability Report	2016-2017	Secara bertahap mewajibkan LJK menyampaikan <i>sustainability report</i> untuk kepentingan pengawasan dan transparansi kepada masyarakat. <i>Sustainability report</i> akan menjadi bagian dari <i>integrated report</i> .
7	Sustainability Report	2016-2017	Issuance of sustainability report will gradually become mandatory for reason of transparency to wider public and OJK supervision. Sustainability report will be part of integrated report
8	Sustainable Finance Award (SFA)	2016-2024	Pemberian penghargaan atas prestasi LJK dalam pengembangan keuangan berkelanjutan yang diberikan oleh OJK, KLHK dan instansi terkait lainnya.
8	Sustainable Finance Award (SFA)	2016-2024	Special award granted to commendable FSI that lead the implementation of sustainable finance. The prize will be awarded by OJK in collaboration with Ministry of Environmental Affairs and Forestry and other relevant institutions.
9	Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan Berkelanjutan	2019-2024	Menyempurnakan kebijakan/aturan manajemen risiko LJK dengan memasukkan aspek risiko lingkungan hidup dan sosial
9	Policy and Regulation on Risk Management related to Sustainable Finance program implementation	2019-2024	Refinement of policies/regulations in the area of risk management pertinent to sustainable finance to include environmental and social aspects.
10	Program Kampanye kepada masyarakat calon investor	2015-2019	Menyelenggarakan program kampanye kepada masyarakat calon investor bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait di seluruh wilayah Indonesia
10	Campaign Program	2015-2019	Implementation of campaign program to public as potential investors in partnership with relevant institutions.

No	Rencana Kerja / Activity	Tahun / Implementation Year	Keterangan / Note
11	<i>Green Lending Model</i> untuk sektor ekonomi prioritas	2015-2019	Menyediakan <i>Green lending model</i> sektor ekonomi prioritas bagi LJK untuk tahun 2015-2016 difokuskan untuk mendukung program ketahanan energi
11	Green Lending Models for priority sectors	2015-2019	Provision of green lending model pertaining priority sectors in 2015-2016 with special focus on supporting national energy resilience plan.
12	Training Analis Lingkungan Hidup (TAL)	2015-2019	Menyelenggarakan TAL bekerjasama dengan lembaga penyelenggara training/ perguruan tinggi dengan dukungan lembaga donor. Target: 1.000 - 2.000 SDM LJK dan Pengawas LJK dalam jangka waktu 5 tahun
12	Environmental Analysts Training	2015-2019	Provision of environmental analysis trainings in collaboration with training provider, universities and donor institutions. The target is to train 1,000 – 2,000 staffs of FSI, OJK officials and OJK supervisors in 5 year.
13	Pengembangan <i>green product</i> Perbankan dan IKNB	2015-2024	Mendorong Perbankan dan IKNB untuk mengembangkan produk layanan ramah lingkungan hidup termasuk <i>benchmarking</i> dari internasional
13	Development of green product both for banking and non-banking industries	2015-2024	Development of green products for banking and non-banking industries. The activity might include using international best practices and standards as benchmarks.
14	Pengembangan <i>Green Bond</i>	2015-2024	Mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menerbitkan <i>green bond</i>
14	Development of Green Bonds in Indonesia	2015-2024	Provision of required supports to relevant government institution and industry practitioners in the development and issuance of green bonds.
15	Pengembangan <i>Green Index</i>	2015-2024	Mendorong Pasar Modal untuk mengembangkan <i>green index</i>
15	Development of Green Index in Indonesia	2015-2024	Supports to Indonesia stock exchange and capital market practitioners to develop green index.
16	Seminar dan FGD	2015-2024	Menyelenggarakan seminar dan FGD terkait Keuangan Berkelanjutan
16	Focus Group Discussion and Seminars	2015-2024	Focus Group Discussion and Seminars are to be held in collaboration with relevant ministries and donor institutions.
17	<i>Research and Development</i>	2015-2024	Melakukan penelitian bekerjasama dengan lembaga riset domestik maupun internasional di bidang keuangan berkelanjutan
17	Research and Development	2015-2024	Joint research in collaboration with national and international research centers on sustainable finance.

No	Rencana Kerja / Activity	Tahun / Implementation Year	Keterangan / Note
18	Meningkatkan akses LJK pada <i>global public fund</i>	2015-2024	Memfasilitasi IJK untuk mendapatkan akses <i>global public funds</i> a.l. melalui partisipasi OJK pada forum internasional terkait <i>climate change</i> a.l. UNFCCC, APEC dan G-20 dengan memperhatikan mekanisme mitigasi risiko (makro dan mikro prudensial)
18	Increase access of financial service institutions to global public fund	2015-2024	Supports and facilitation for FSI to increase their access to global public funds taking into account risks mitigation mechanism (macro and micro prudential). Increase participation of OJK in international forums related to climate change and sustainable development issues such as UNFCCC, APEC and G-20.
19	Forum Koordinasi Keuangan Berkelanjutan	2015-2024	Membentuk/menginisiasi forum koordinasi keuangan berkelanjutan yang bertujuan 1. Mempercepat dikeluarkannya aturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup serta untuk membahas berbagai permasalahan dan tantangan implementasi keuangan berkelanjutan 2. Melakukan evaluasi secara periodik kemajuan implementasi keuangan berkelanjutan secara reguler serta meningkatkan peranan kantor-kantor OJK pada forum koordinasi tingkat daerah
19	Coordination Forum on Sustainable Finance	2015-2024	Establishment of Sustainable Finance Forum, with specific objectives: 1. To accelerate the issuance of government regulation on technical implementation of Law 32/2009 concerning Environmental Protection and Management. 2. To discuss lessons learned and challenges pertaining the implementation of sustainable finance program. 3. As a mean to conduct regular evaluation on the progress of sustainable finance program and increase active participation of OJK regional offices at regional levels.

Tim Penyusun *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan **Drafting Team Roadmap for Sustainable Finance**

1. Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan OJK / Sustainable Finance Working Group of OJK
2. Sdri./Ms. Rahajeng Pratiwi, International Finance Corporation (IFC) - World Bank Group
3. Kontributor / Contributors
 - a. Kelompok Kerja Keuangan berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Sustainable Finance Working Group of the Ministry of Environmental Affairs and Forestry
 - b. Prof. Dr. Emil Salim
 - c. Ir Wahyuningsih Darajati Msc, Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Director of Environmental Affairs, National Development Planning Agency (Bappenas)
 - d. Ir Maritje Hutapea, Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) / Director of Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources
 - e. Sdr./Mr. Choirul Djamhari, Ph. D., Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) / Deputy for Financing Division, Ministry of Cooperatives and Small & Medium Enterprises
 - f. Sdr./Mr. Mulyadi Hendiawan, Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian / Director for Financing Division, Ministry of Agriculture
 - g. Sdr./Mr. Ferry Irawan, Kepala Bidang Analisis Moneter & Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan / Head of Analysis on Monetary and Financial Institution Division, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance
 - h. Sdr./Mr. Benny Soetrisno, Staf Khusus Menteri Perindustrian, Bidang Pengembangan Investasi & Percepatan Proyek Investasi Industri Prioritas, Kementerian Perindustrian / Special Advisor to the Minister of Industry
 - i. Sdr./Mr. Ito Warsito, Presiden Direktur, Bursa Efek Indonesia (BEI) / President Director of Indonesia Stock Exchange
 - j. Sdri./Ms. Retno Setianingsih, Sdr./Mr. Raymond Bona, dan Sdri./Ms. Retno Soebagio, Indonesia Clean Energy Development (ICED-USAID) / Indonesia Clean Energy Development - USAID (ICED-USAID)
 - k. Sdr./Mr. Glenn Mandey, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber dan peserta Focus Group Discussion Keuangan Berkelanjutan. Special thanks are conveyed to resource persons and participations of Focus Group Discussions on Sustainable Finance



Menara Radius Prawiro, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH Thamrin No. 2 Jakarta-10350